



LAPORAN
CAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH (IKPD)

TRIWULAN III
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2024

DATA POKOK–KECAMATAN KRANGGAN

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
2.	Persentase penyelesaian Jumlah Pelayan masyarakat di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
3.	Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	IP	V	V	V	V	V
4.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
5.	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan Kondisi Baik	IP	V	V	V	V	V
6.	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	IP	V	V	V	V	V
7.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
8.	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	IP	V	V	V	V	V
9.	Persentase desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Tabel 1.1
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan

indeks kepuasan masyarakat terhadap n unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kranggan selama 5 tahun terakhir.

Tabel.1.2
Nilai IKM Kecamatan Kranggan Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Predikat
1	2019	B
2	2020	B
3	2021	B
4	2022	B
5	2023	B
6	2024	B

Sumber : Kecamatan Kranggan Tahun 2024 s/d triwulan III

Berdasarkan table diatas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kranggan untuk tahun 2024, data Triwulan III mendapat nilai 84.94 dengan kategori baik (B). Faktor pendorong yang mendukung tercapainya indikator tersebut dikarenakan masyarakat menginginkan peningkatan dan kualitas pelayanan

yang baik. Untuk terus meningkatkan capaian IKM yang semakin baik, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas.

Faktor pendorong adanya peningkatan ini disebabkan oleh masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya penelitian terutama tentang IKM sehingga mereka mau untuk berpartisipasi dalam pengisian kuisisioner. Namun tidak semua masyarakat memahami kuesioner secara online, hal ini menjadi faktor penghambat dalam penelitian. Upaya yang dilakukan kecamatan dengan pendampingan kepada masyarakat ketika melakukan pengisian kuisisioner

Berikut tabel hasil survey kepuasan masyarakat secara mandiri terhadap pelayanan di Kecamatan Kranggan ;

Tabel 1.3
 Nilai IKM Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun
 2023 s/d Triwulan IV

No.	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,20	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,28	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,14	Baik
4	Biaya/Tarif	3,93	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,32	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,21	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,19	Baik
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,19	Baik
9	Sarana dan Prasarana	4,12	Sangat Baik
Nilai IKM			
Konversi Nilai IKM		84,94	

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

2. Persentase Jumlah Pelayanan di Kecamatan Kranggan

Menurut Peraturan Bupati Nonor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas salah satunya yaitu menyelenggarakan pelayanan publik di kecamatan sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan Rumus perhitungan presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan Kranggan adalah Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah Pemohon Pelayanan di Kecamatan Kranggan. Presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.1
Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan di Kecamatan Kranggan Tahun 2020-2024 s/d Tri Wulan III

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani	na	na	na	na	na	1388
2	Jumlah Permohonan Pelayanan	na.	na.	na.	na.	na.	1388
3	% Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan						100

Sumber : Kecamatan Kranggan Tahun 2024

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase jumlah masyarakat yang dilayani sampai dengan Triwulan I sejumlah 390 dan jumlah Masyarakat yang terlayani di Triwulan II sejumlah 591 sedangkan jumlah Masyarakat yang terlayani di Triwulan III sejumlah 407 sehingga jumlah keseluruhan pengguna layanan dan terlayani sampai dengan triwulan III sejumlah 1388 orang telah tercapai 100% . diwilayah kecamatan Kranggan cukup aktif dalam memberikan pelayanan. Pemohon pelayanan mulai dari permohonan SKCK, Legalisasi, Surat Keterangan, Pengajuan Proposal dan Perckaman KTP baru rata rata perhari bisa mencapai 5 - 15 pemohon pelayanan.

Tabel 2.2
Jumlah Pelayanan yang ada di Kecamatan Kranggan s/d Triwulan III Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	TW I	TW II	TW III	Jumlah Pemohon	Jumlah Terlayani
1	Legalisasi/ Surat Keterangan	84	177	67	328	328
2	Permohonan KTP baru/perubahan	112	93	92	297	297
3	Permohonan KK	44	29	32	105	105
4	Permohonan SKCK	133	281	199	613	613
5	Pelayanan pengajuan Proposal	4	-	10	14	14
6	Mutasi Penduduk	7	5	-	13	13
7	Surat Rekomendasi	6	6	7	19	19
JUMLAH		390	591	407	1388	100 %

Sumber : Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Triwulan III

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa setiap warga yang meminta pelayanan selalu terlayani.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 3.1
Jumlah Realisasi Penerimaan PBB
di Kecamatan Kranggan Tahun 2020-2024 s/d Tri Wulan III

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	727.059.608	593.043.154	991.938.690	1.597.068.847	1.753.102.792	1.779.423.664
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	744.687.622	620.174.243	1.023.381.592	1.674.304.289	1.974.877.422	2.020.911.885
3	Persentase (%)	97,63	95,63	96,93	95,39	90,65	88,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dan belum pernah mencapai realisasi sampai 100 % dikarenakan berbagai kendala sedangkan untuk tahun 2024 ini mengalami kenaikan ketetapan PBB yang semula 1.974.877.422 menjadi

2.022.911.885 sedangkan untuk realisasi sampai dengan triwulan III ini sudah mencapai 88.05 % sampai dengan batas waktu 30 September 2024 realisasi penerimaan PBB di wilayah kecamatan Kranggan dan baru 7 Desa yang sudah lunas 100 % masih dilakukan juga Upaya monitoring secara rutin oleh tim Monev PBB di Tingkat Kecamatan untuk mendongkrak prosentase realisasi PBB di wilayah Kecamatan Kranggan .

Faktor pendorong dari realisasi penerimaan PBB adalah adanya daya pikir masyarakat akan pentingnya PBB bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Faktor penghambatnya yaitu adanya kenaikan ketetapan PBB dan kesadaran petugas pemungut di tingkat kelurahan/desa masih kurang sehingga penarikan PBB menjadi sedikit lamban. Upaya pencapaian yang dilakukan adalah meningkatkan monitoring rutin ke Kelurahan dan desa-desa oleh Tim dari Kecamatan dan Kabupaten.

Tabel 3.2

Dengan tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB Tahun 2024 s/d Triwulan III sebagai berikut :

No	Desa	Uraian				Persentase (%)
		Jumlah ketetapan PBB		Jumlah realisasi penerimaan PBB		
		SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	
1	Kranggan	2.184	238.879.654	1101	179.523.880	75.15
2	Badran	2.602	323.665.645	1315	252.855.809	78.12
3	Bengkal	2.533	384.998.268	2533	384.998.268	100
4	Pare	1.393	55.550.801	1084	39.546.575	71.19
5	Nguwet	2.491	424.229.611	1998	368.442.106	86.86
6	Ngropoh	3.446	52.923.068	3446	52.923.068	100
7	Pendowo	4.343	85.752.463	4343	85.752.463	100
8	Sanggrahan	3.102	84.864.138	2439	65.577.155	77.29
9	Klepu	2.612	52.627.695	2612	52.627.695	100
10	Kemloko	4.404	83.168.060	4.404	83.168.060	100
11	Gentan	3.888	85192.263	3.888	85192.263	100
12	Kramat	2.195	51.064.511	1336	30.741.472	60.20
13	Purwosari	3.836	98.036.180	3.836	98.036.180	100
JUMLAH		38.903	2.020.911.885	34.335	1.779.423.664	88.05

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

(30 September 2024)

Dokumentasi Kegiatan Monitoring PBB Triwulan III Tahun 2024



4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat

waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Triwulan III, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Triwulan III

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	4	11	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	33,33	91,66	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif, sampai dengan tahun 2024 triwulan Triwulan III.

Faktor pendorong dari penyelesaian RKP-Desa ini adanya pendampingan dari pihak Kecamatan. Selain itu RKPDes juga sebagai kelengkapan administrasi untuk pencairan anggaran ditahun berjalan. Namun tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer serta tidak semua aparatur pemerintah desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa, hal ini menjadi faktor penghambat dalam menyelesaikan RKP-Desa. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator dengan Peningkatan pembinaan dan pendampingan ke desa-desa.

Tabel 4.2

Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	Nomor RKP-Desa	Tanggal RKP-Desa	Keterangan
1.	Badran	06 Tahun 2024	25 September 2024	Tepat waktu
2.	Bengkal	06 Tahun 2024	26 September 2024	Tepat waktu
3.	Pare	06 Tahun 2024	25 September 2024	Tepat waktu
4.	Nguwet	06 Tahun 2024	27 September 2024	Tepat waktu
5.	Ngropoh	05 Tahun 2024	26 September 2024	Tepat waktu
6.	Pendowo	06 Tahun 2024	26 September 2024	Tepat waktu

7.	Sanggrahan	05 Tahun 2024	22 September 2024	Tepat waktu
8.	Klepu	06 Tahun 2024	25 September 2024	Tepat waktu
9.	Kemloko	05 Tahun 2024	25 September 2024	Tepat waktu
10.	Gentan	06 Tahun 2024	25 September 2024	Tepat waktu
11.	Kramat	06 Tahun 2024	26 September 2024	Tepat waktu
12.	Purwosari	07 Tahun 2024	27 September 2024	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

5. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Baik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang Baik, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang Baik, sehat, dan aman di wilayah kelurahan.

Sarpras disebut Baik jika memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan akses. Dan kondisi fisik bangunan 80% baik.

Rumus penghitungan dari presentase sarana dan prasarana local kelurahan Kondisi Baik adalah jumlah sarpras local kelurahan Kondisi Baik dibagi jumlah sarpras local kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase sarana dan prasarana local kelurahan Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung masih berjalan dari tahun 2023 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Baik
Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan,
Tahun 2023 s/d 2024 Triwulan III

NO	URAIAN	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 TW III
1	Jumlah sarpras lokal kelurahan Kondisi Baik	14	16	18	64	67	69
2	Jumlah sarpras lokal kelurahan	14	16	21	71	71	72
3	% Sarana dan prasarana lokal kelurahan Kondisi Baik	100	100	85,71	90,14	97,18	95,83

Sumber : Kelurahan Kranggan tahun 2024 s/d triwulan III

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan Kondisi Baik tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah 94,36%, dari jumlah 72 sarpras di kelurahan Kranggan pada tahun 2023 untuk tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran untuk rehab Balai kelurahan yang progresnya sudah 100 % dan sisanya masih ada 3 Sarpras yang kondisinya rusak dan belum bisa direalisasikan untuk perbaikan dikarenakan keterbatasan anggaran .

Adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan menjadi faktor pendorong meningkatnya sarana dan prasarana lokal kelurahan. Namun dalam hal ini juga terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset kelurahan. Upaya yang harus dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan Monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.

Tabel 5.2
Daftar Sarana dan Prasarana Kelurahan Kondisi Baik
di Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dan 2024 s/d triwulan III

No	Nama Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kondisi Baik	Kondisi Tidak Baik
1	Lapen Aspal RW II	Baik	-
2	Rabat Beton Jalan RT 03 RW VI	Baik	-
3	Balai RW.VI	Baik	-
4	Balai RW II	-	Tidak Baik
5	Balai Rw VII	-	Tidak Baik

No	Nama Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kondisi Baik	Kondisi Tidak Baik
6	Balai RW III	-	Tidak Baik
7	Drainase RT 01 RW V	Baik	-
8	Drainase RT.04 RW.IV	Baik	-
9	Drainase RT.04 RW.I	Baik	-
10	Drainase RT 03 RW IV	Baik	-
11	Rabat Beton RT 01 RW I	Baik	-
12	Rabat Beton RT.02 RT.04 RW.IV	Baik	-
13	Rabat Beton RT 01 RW III Kenalan	Baik	-
14	PJU RT 03 RT 04 RW I	Baik	-
15	Jalan Makam Kemloko RW V	Baik	-
16	Talud RT 04 RW II	Baik	-
17	Rabat Beton RT.01 RW.II	Baik	-
18	Drainase RT.01 RW.II	Baik	-
19	Rabat Beton RT 03 RW V	Baik	-
20	Drainase RT.02 RW.V	Baik	-
21	Rabat Beton RT.04 RW.I	Baik	-
22	Lapangan Sepak bola Kelurahan	Baik	-
23	Rumah Lagan RW.I	Baik	-
24	Drainase RT.03 RW.V	Baik	-
25	Talud RW. VI	Baik	-
26	Balai RW.I	Baik	-
27	Balai RW.IV	Baik	-
28	Alat Pemadam Api Ringan tiap RW	Baik	-
29	Gapura RW.I Dayakan	Baik	-
30	Gapura RW.II Prapak	Baik	-
31	Gapura RW.III Kenalan	Baik	-
32	Gapura RW.IV Kasanan	Baik	-
33	Gapura RW. V Kranggan	Baik	-
34	Gapura RW.VI Gandokan	Baik	-
35	Gapura RW.VII Selumbung	Baik	-
36	Tempat Pemakaman Umum RW.I	Baik	-
37	Tempat Pemakaman Umum RW.II	Baik	-
38	Tempat Pemakaman Umum RW.III	Baik	-
39	Tempat Pemakaman Umum RW.IV	Baik	-
40	Tempat Pemakaman Umum RW.V	Baik	-
41	Tempat Pemakaman Umum RW.VI	Baik	-
42	Tempat Pemakaman Umum RW.VII	Baik	-
43	Gorong-gorong RW.I Dayakan	Baik	-
44	Gorong-gorong RW.II Prapak	Baik	-
45	Gorong-gorong RW.VI Gandokan	Baik	-
46	Gorong-gorong RW.VII Selumbung	Baik	-
47	Ruang Terbuka Hijau RW.VII	Baik	-
48	Pos Kamling RT.02 RW.I	Baik	-
49	Pos Kamling RT.03 RW.I	Baik	-
50	Pos Kamling RT.04 RW.I	Baik	-
51	Pos Kamling RT.01 dan RT.05 RW.II	Baik	-
52	Pos Kamling RT.02 RW.II	Baik	-
53	Pos Kamling RT.03 RW.II	Baik	-
54	Pos Kamling RT.04 RW.II	Baik	-
55	Pos Kamling RT.06 RW.II	Baik	-
56	Pos Kamling RT.01 RW.III	Baik	-
57	Pos Kamling RT.02 RW.III	Baik	-
58	Pos Kamling RT.03 RW.III	Baik	-
59	Pos Kamling RT.01 RW.IV	Baik	-



No	Nama Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kondisi Baik	Kondisi Tidak Baik
60	Pos Kamling RT.02 RW.IV	Baik	-
61	Pos Kamling RT.03 RW.IV	Baik	-
62	Pos Kamling RT.05 RW.IV	Baik	-
63	Pos Kamling RT.01 dan RT.02 RW.VII	Baik	-
64	Pos Kamling RT.03 RW.VII	Baik	-
65	Instalasi Pengolahan Air Limbah RT.05 RW.IV Kasanan	Baik	-
66	Jalan Aspal RT.02 dan RT.03 RW.II	Baik	-
67	Jalan Aspal RT.03 RW I	Baik	-
68	Jalan Aspal RW.III	Baik	-
69	Jalan Aspal RW.V	Baik	-
70	Jalan Aspal RW.VI	Baik	-
71	Jalan Aspal RW.VII	Baik	-
72	Balai Kelurahan Kranggan	Baik	-

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Dokumentasi kegiatan sarana prasarana di kelurahan kranggan





6. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Rumus penghitungan dari presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%. Realisasi presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dari tahun 2023 s/d 2024 Triwulan II dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 6.1
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
Tahun 2020 s/d 2024 Triwulan III

NO	URAIAN	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 s/d TW III
1.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	40	41	42	47	48	49
2.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan	40	41	42	47	48	49

3.	% Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	100	100	100	100	100
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Kelurahan Kranggan Tahun 2024 s/d triwulan III

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah 100%. Hal ini didorong dengan adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Faktor penghambat dalam indicator ini yaitu banyaknya personil anggota lembaga masyarakat kelurahan yang memiliki aktifitas pribadi yang sangat padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk kegiatan lembaga masyarakat kelurahan. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian dengan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.

Tabel 6.2
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Kranggan Tahun 2024 s/d triwulan III

No	Nama Lembaga	Jumlah Total Yang Ada	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
1	RT	30	30	0	100%
2	RW	7	7	0	100%
3	LPMK	1	1	0	100%
4	PKK	1	1	0	100%
5	KARANG TARUNA	1	1	0	100%
6	LINMAS	1	1	0	100%
7	POSYANDU	7	7	0	100%

7. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2024 s/d Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dan 2024 s/d Triwulan III

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	5	3	7	2	6	11
2	Jumlah laporan kejadian	5	3	7	2	6	11
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2024 sampai dengan Triwulan I terdapat 5 kejadian yang terlapor, persentase laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pencapaiannya 100 % karena setiap ada laporan kejadian selalu ditindaklanjuti untuk laporan kejadian pada Triwulan II ini ada 5 kejadian yang juga langsung ditindak lanjuti sehingga jumlah kejadian dari Triwulan I dan II ada 10 kejadian sedangkan laporan kejadian di Triwulan III ada 1 laporan kebakaran di desa badran sehingga jumlah laporan kejadian sampai dengan Triwulan III di tahun 2024 ini ada 11 laporan kejadian dan semua dapat ditindak lanjuti dengan baik.

Faktor pendorong dalam indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik antara linmas/hansip, desa, kecamatan dan unsur keamanan. Namun, masih ada kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya yang tidak dilaporkan oleh desa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan dengan tindakan prefentif untuk pencegahan terjadinya kejadian yang merugikan.

Tabel 7.2
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Triwulan III

NO	DESA/KEL	NAMA KEJADIAN	TW I	TW II	TW III
1	Kranggan	Penangkapan Ular dan Jembatan Ambrol		2	
2	Badran	Kebakaran			1
3	Bengkal	-			
4	Pare	Pohon tumbang		1	
5	Nguwet	-			
6	Ngropoh	Korban Tenggelam di embung abimanyu		1	
7	Pendowo	Rumah roboh	1		
8	Sanggrahan	Kebakaran, KLB Demam berdarah	2		
9	Klepu	-			
10	Kemioko	Kebakaran	1		
11	Gentan	Pohon tumbang Rumah Kebakaran	1	1	
12	Kramat	-			
13	Purwosari	-			

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Dokumentasi Laporan Kejadian yang terjadi di Kecamatan Kranggan



8. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 9.1
Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa
dan Perangkat Desa
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2019 s/d 2024 Triwulan II

NO	URAIAN	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 s/d TW III
1	Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	0	1	0	0	1
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	149	188	188	188	195	191
3	Persentase (%)	100	100	0.51	100	100	0.51

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Kranggan tahun 2024 sampai dengan triwulan III masih mengacu pada data laporan Triwulan I Tahun 2024 dimana 1 orang perangkat Desa yang diputus hukuman disiplin dengan SK Pemberhentian terhitung di bulan Februari 2024. Pelanggaran disiplin terhadap ketidak hadiran perangkat desa tersebut dalam kurun waktu 40

hari kerja berturut turut.

Hal ini dikarenakan kurangnya Kesadaran oknum perangkat akan kedisiplinan yang disebabkan masalah pribadi yang akhirnya mengganggu kinerja perangkat tersebut. Namun masih banyak perangkat desa yang paham dengan tugas pokok dan fungsinya dan memiliki kesadaran untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja. Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan rutin ke desa-desa dan pemberian reward dan punishment.

Tabel 9.2
Pelanggaran Disiplin Kepala Desa
dan Perangkat Desa

NO.	DESA	JUMLAH PERANGKAT	JUMLAH PELANGGARAN
1	BADRAN	13	-
2	BENGKAL	12	-
3	PARE	12	-
4	NGUWET	13	-
5	NGROPOH	20	-
6	PENDOWO	19	1
7	SANGGRAHAN	17	-
8	KLEPU	13	-
9	KEMLOKO	19	-
10	GENTAN	22	-
11	KRAMAT	13	-
12	PURWOSARI	18	-
JUMLAH		191	-

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2024 s/d Triwulan III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2019 dan 2024 s/d Triwulan III

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s/d TW III
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan tahun 2024 triwulan III tidak ada yang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan APBDes sehingga persentasenya tetap 100%.

Hal ini didorong dengan adanya pendampingan dari Tingkat Kecamatan dan Perangkat desa sudah tertib administrasi. Faktor penghambat dalam indikator ini yaitu tidak semua aparatur desa mahir menggunakan komputer/aplikasi penyusunan APB-Des dan sarana prasarana yang tepat. Sehingga upaya yang dapat dilakukan dengan Pembinaan dan koordinasi ke desa-desa.

Tabel 10.2
Penyelesaian Perubahan APB-Desa

No	Nama Desa	No APBDes	Tanggal APBDes	Keterangan
1.	Badran	4 Tahun 2024	29 Juli 2024	Tepat waktu
2.	Bengkal	4 Tahun 2024	29 Juli 2024	Tepat waktu
3.	Pare	2 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
4.	Nguwet	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat Waktu
5.	Ngropoh	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
6.	Pendowo	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
8.	Klepu	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
9.	Kemloko	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
10.	Gentan	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
11.	Kramat	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu
12.	Purwosari	3 Tahun 2023	29 Juli 2024	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2024 s/d triwulan III

Temanggung, Oktober 2024

Plt. Camat Kranggan



MARLINI TARIGAN S.STP, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 197903151997112001

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian 1d TW III : 2024	Sifat & Nilai Peringkat Kinerja			Rumus	Faktor Pendukung	Faktor Pembatas	Uraian Perencanaan Target Kinerja Tahun 2024
					2024	2025	2026			Sangat Rendah	Rendah	Sedang				
A. UJIAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS WILAYAH																
INDUKTOR JAWABAN PERANGKAT DAERAH (KUPD)																
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (KPM)																
1. Persentase jumlah pelayanan publik yang berkualitas																
2. Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan																
3. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang layak																
4. Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang terakreditasi																
5. Persentase pelayanan publik yang terjangkau																
6. Persentase pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan																
7. Persentase jumlah desa yang melaksanakan KP-Des tepat waktu																
8. Persentase jumlah desa yang melaksanakan KP-Des tepat waktu																
9. Jumlah KUPD																
10. Jumlah Indikator Program																
11. Jumlah Total Indikator Program																



